



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TONNY BELLAMY**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT PENJUALAN & PELAYANAN PELANGGAN RETAIL**
3. NHK : **205064**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.080.000.000</b>
1. Tanah Seluas 221 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 1.330.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/63 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.633.800.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000		
2. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
3. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>167.500.000</b>
<b>D. SURAT BERTAHAGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>555.885.540</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.437.185.540</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>94.645.000</b>



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.342.540.540

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.